

***WANTIKNAS  
KEPPRES 1/12014  
KEPMEN KEP 96/MPPN/10/2014  
KEPMEN KEP 45/MPPN/04/2020  
(Tgl 28 April 2020)  
REFERENSI UNTUK WANTIKDA***



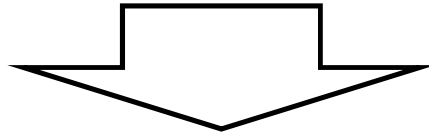
*Garuda Sugardo*

**VIDEO CONFERENCING  
Jakarta, 12 Mei 2020**

## Tupoksi WANTIKNAS (Keppres No. 1 Tahun 2014)

- **Merumuskan kebijakan umum dan arahan strategis** pembangunan nasional, melalui pengembangan **teknologi informasi dan komunikasi** termasuk **infrastruktur, aplikasi, dan konten**;
- Melakukan pengkajian, evaluasi, dan masukan dalam **menetapkan langkah-langkah penyelesaian permasalahan strategis** yang timbul dalam rangka pengembangan **teknologi informasi dan komunikasi**;
- **Melakukan koordinasi nasional** dengan **instansi Pemerintah Pusat/Daerah, Badan Usaha Milik Negara/Badan Usaha Milik Daerah, Dunia Usaha**, Lembaga Profesional, dan masyarakat pada umumnya dalam rangka pengembangan **teknologi informasi dan komunikasi** serta memberdayakan masyarakat; dan
- **Memberikan persetujuan** atas pelaksanaan program pengembangan **teknologi informasi dan komunikasi** yang bersifat **lintas kementerian** agar efektif dan efisien.

# Konsiderans Perubahan



”bahwa perkembangan teknologi informasi dan komunikasi yang mengarah kepada terjadinya **transformasi digital** suatu bangsa harus diarahkan kepada **pencapaian tujuan berbangsa dan bernegara**”



## TUPOKSI “WANTIKNAS BARU”

1. **Merumuskan kebijakan umum dan arahan strategis** pembangunan nasional, melalui proses **Transformasi Digital**
2. **Menetapkan langkah-langkah penyelesaian permasalahan strategis** yang timbul dalam penerapan **Transformasi Digital**
3. **Melakukan koordinasi nasional** dengan instansi Pemerintah Pusat/Daerah, BUMN/BUKD, Dunia Usaha, Lembaga Profesional, dan masyarakat pada umumnya dalam rangka pelaksanaan **Transformasi Digital**, dan
4. **Memberikan persetujuan** atas pelaksanaan **Transformasi Digital** lintas kementerian agar efektif dan efisien.

# PERPRES 96/2014 RPI -> PERPRES 95/ 2018 SPBE



2014-2019

- BROADBAND PLAN : “USABLE, AFFORDABLE, EMPOWERING”
- MENGHAPUS KESENJANGAN DIGITAL INDONESIA 2019
- IMPLEMENTASI MEANINGFUL BROADBAND KAB/KOTA INITIATIVE

Prioritas:  
E-GOV'T, E-HEALTH,  
E-EDU, E-LOG, E-PROC



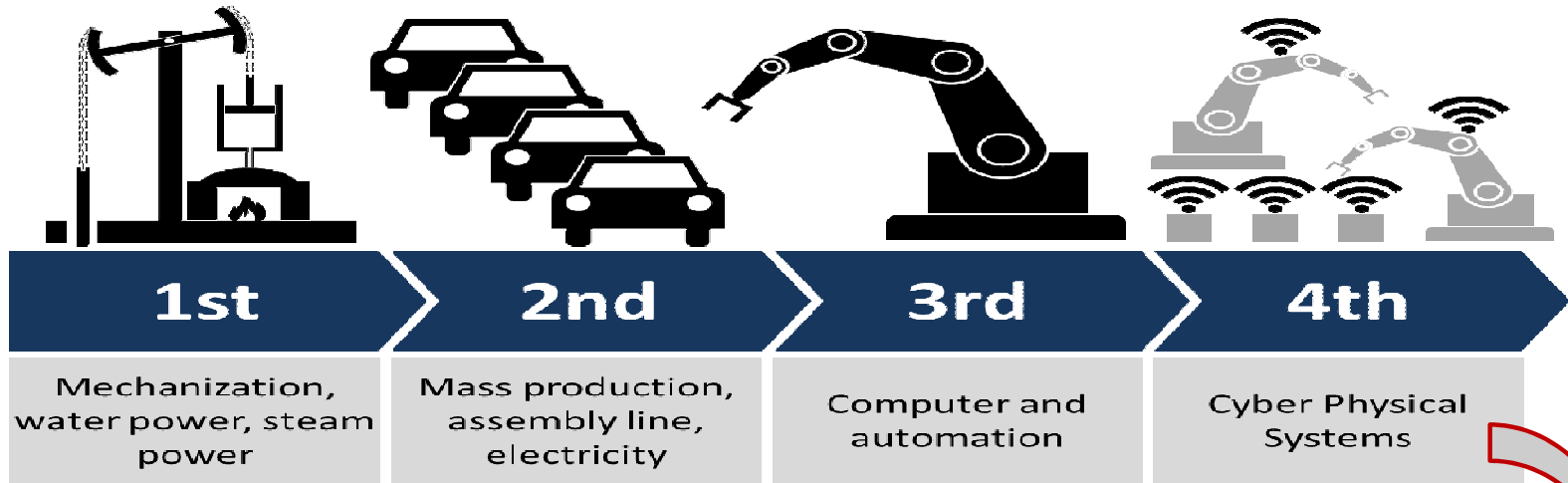
SPBE

*CONNECT*  
*INNOVATE*  
*TRANSFORM*

DIGITAL  
TRANSFORMATION



# INDUSTRI 4.0 BERBASIS TRANSFORMASI DIGITAL



<i>Hubungan</i>	<b>feodalisme</b>	<b>peserta</b>	<b>rekanan</b>	<b>mitra</b>
<i>Ciri Khas</i>	<b>INSTRUKSI</b>	<b>PARTISIPASI</b>	<b>KERJA SAMA</b>	<b>KOLABORASI</b>

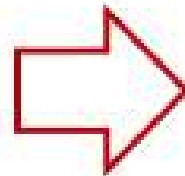


- Layanan online dan terintegrasi
- Akses via ponsel dan omni channel
- Interaksi interaktif dan personal
- Teknologi teleconferencing
- HC mumpuni dan futuristik



## 4 TARGET KABINET INDONESIA MAJU

1. 5 (LIMA) PROGRAM PRIORITAS (SDM IPTEK, INFRASTRUKTUR, OMNIBUS LAW, DEBIROKRASI ASN, EKONOMI DIGITAL)
2. MAKING INDONESIA 4.0
3. IBUKOTA NEGARA (IKN)
4. 5 DESTINASI WISATA SUPERPRIORITAS



# TRANSFORMASI DIGITAL

*Digital Transformation*



Program Transformasi Digital di masing-masing institusi / organisasi dapat berbeda-beda sesuai tujuan yang akan dicapai dan kearifan lokalnya

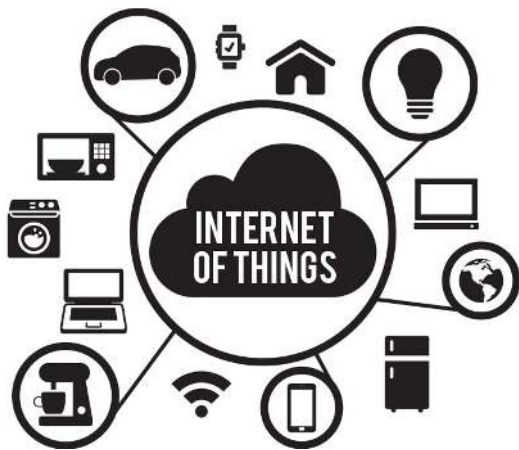
**Transformasi Digital** merupakan bagian dari proses teknologi maju yang penerapannya memberikan dampak perubahan pada seluruh aspek kehidupan dalam masyarakat.





# TRANSFORMASI DIGITAL

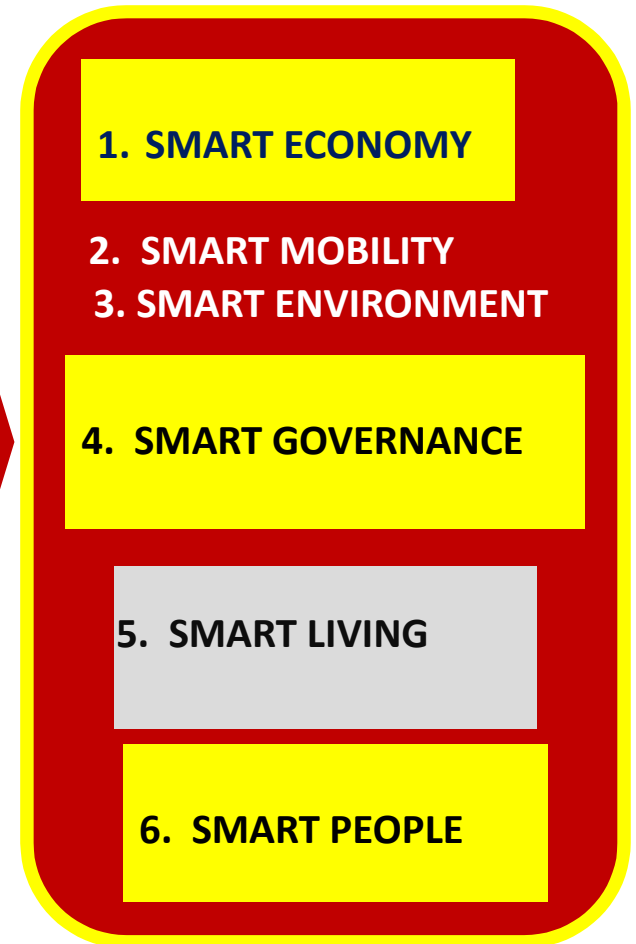
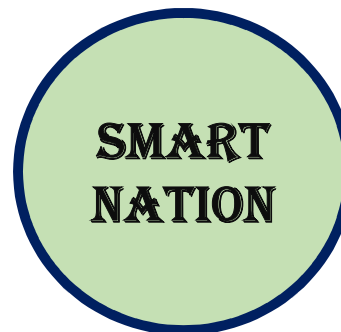
TRANSFORMATION IS THE GOAL, **DIGITAL IS THE TOOL**



# SMART NATION UNTUK PSBB

## DISRUPTIF BARU

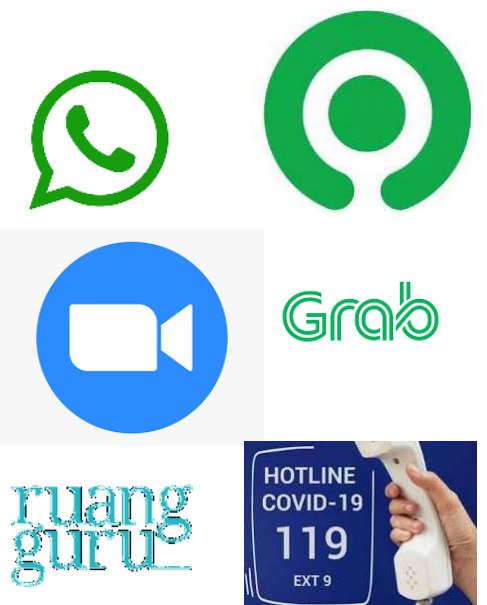
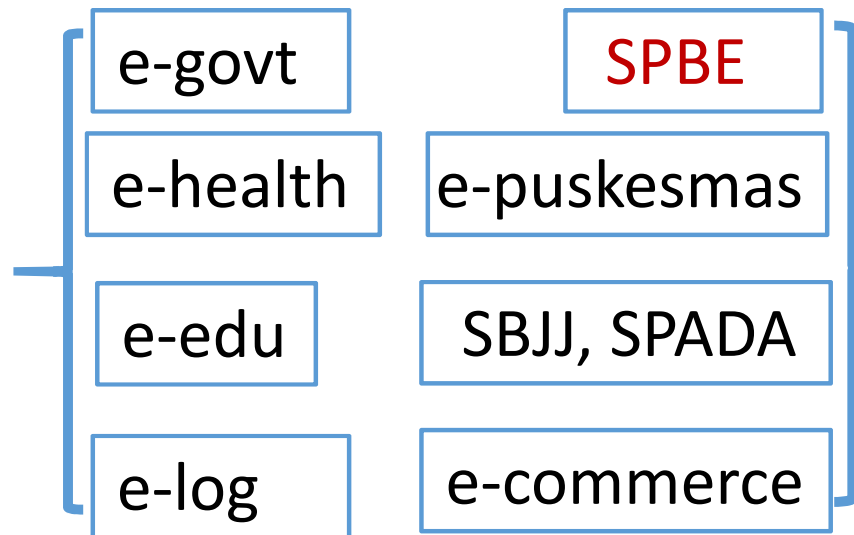
1. PSBB #dirumahaja
2. WFH & SFH
3. Ekonomi Digital
4. Hoax, Fake news



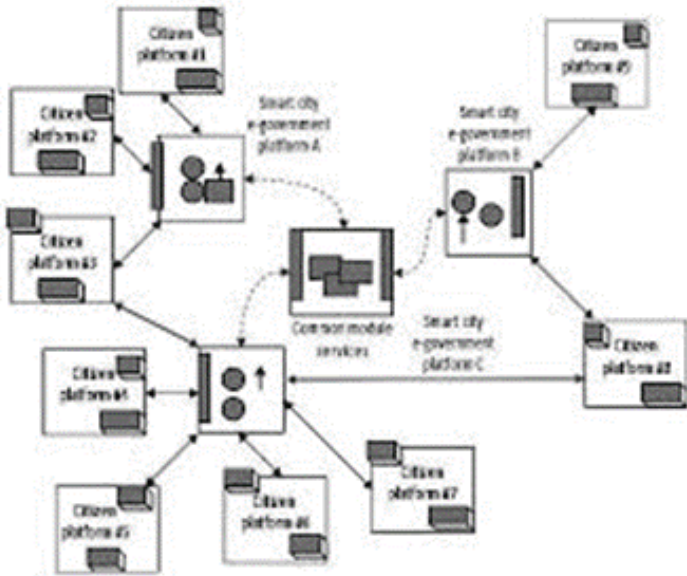
# Implementatifkah?

## Program

## Solusi Pada PSBB



# “Smart City Nasional”



### PERPRES 95/2018 TENTANG SPBE

Platform kebijakan SPBE untuk keterpaduan pembangunan SPBE di Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah

**SPBE**  
adalah penyelenggaraan pemerintahan yang memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk memberikan layanan kepada pengguna SPBE

**Tujuan**

- Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang lebih efektif, transparan, dan akuntabel
- Meningkatkan akses dan kelengkapan penyelenggaraan SPBE



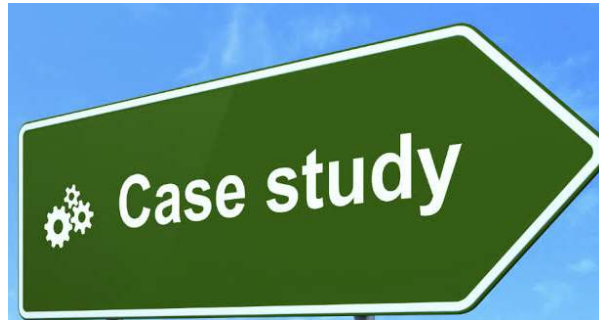
**PERPRES NO. 39/2019  
SATU DATA INDONESIA**

**TD UNTUK  
SMART CITY  
INTEROPERABILITY**



**SUDAH WAKTUNYA  
DIPIKIRKAN KONSEP  
SMART CITY NASIONAL**





- Singapura memiliki *Chief Smart City Officer*
- Regional memiliki ASCN (ASEAN Smart City Network) dengan 26 *flagship* dengan *unique action plans*
- Sinergi 3 pilar : ekonomi digital, yan masyarakat, dan *interoperability*

# Transformasi Digital Bukanlah tentang Teknologi

Kompas.com - 02/10/2019, 14:21 WIB



BERMAKNA.ID SELF PRODUCTIVITY CULTURE HEALTH HAPPINESS

BAGIKAN:  



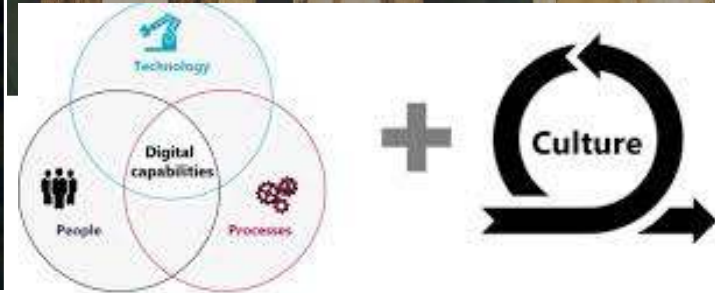
## Bukan Transformasi Digital Kalau Tanpa Budaya Digital

CULTURE ADMIN FEBRUARY 24, 2019

COMMUNICATION / CULTURE / LEADERSHIP / LEARNING & DEVELOPMENT / OTHERS

### Transformasi Digital Hanya Setengah Hati, Jika Tanpa Digital Culture (Bag. 1)

by NBOGroup Indonesia | Published 28 January 2019



**TRANSFORMASI DIGITAL**

*Digital Transformation*



**WeMakeThe.City**

**WANTIKNAS**  
Desain Teknologi Inovasi dan Komersial Nirkasa



# Diskusi Wantiknas Diserang Zoom Bombing, Adegan Mesum Muncul

CNN Indonesia | Kamis, 16/04/2020 13:47 WIB

Bagikan :  

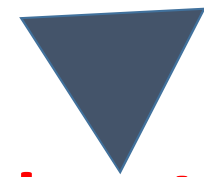
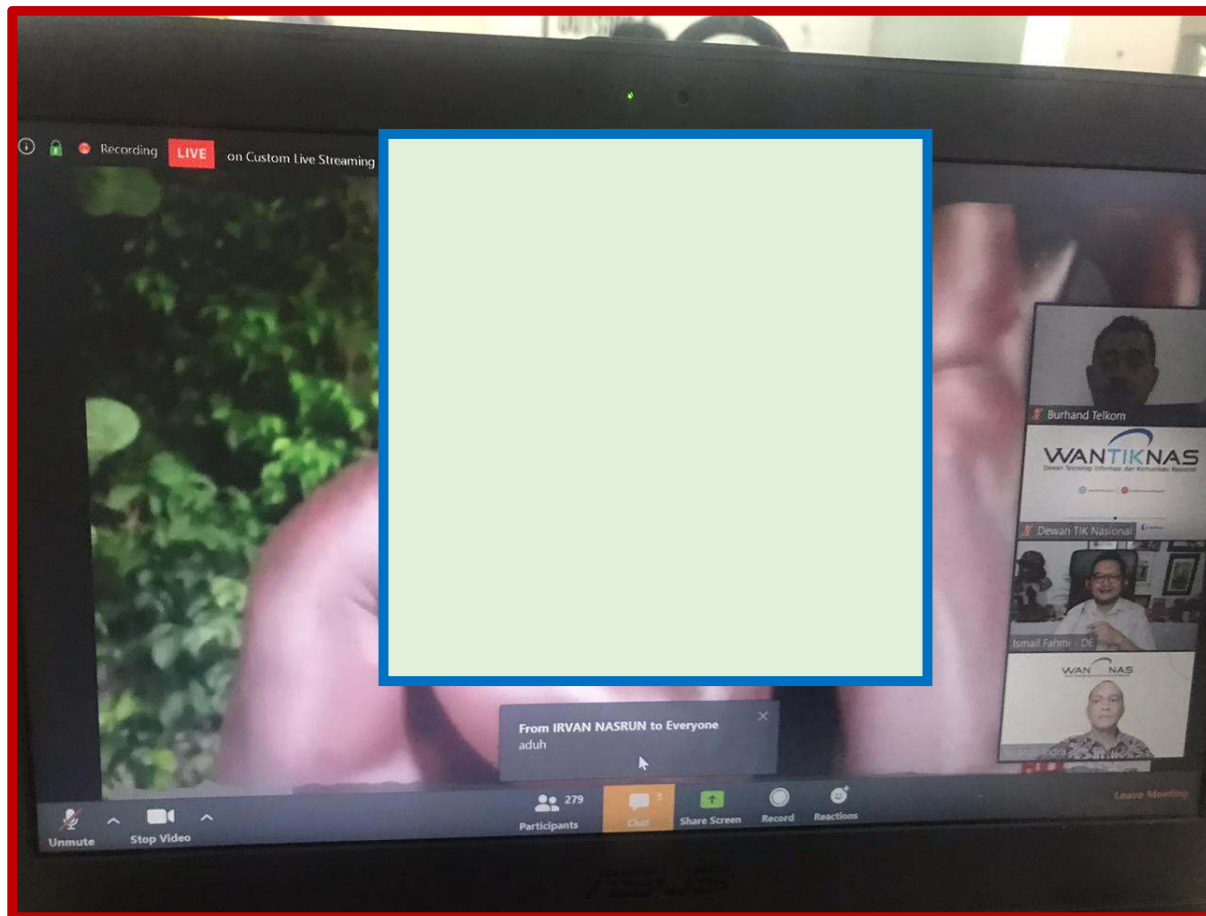
Kamis, 16 April 2020



Adapun pembicara dalam diskusi tersebut Ketua Tim Pelaksana Wantiknas **Ilham Habibie**, Anggota Tim Pelaksana Wantiknas **Garuda Sugardo**, Dirjen IKP Kominfo Widodo Muktiyo, dan Pencipta Aplikasi Drone Empirit Ismail Fahmi.



# Zoomboombing 3x oleh 3 teroris penyusup



**video, KLIK  
jangan??**



**BADAN SIBER DAN SANDI NEGARA**  
DEPUTI BIDANG PROTEKSI

**TLP:WHITE**

Kutipan 7 April 2020

Panduan Keamanan Pemanfaatan Aplikasi *Video Conference*:  
**Upaya Mencegah Penyusup dan Melindungi Data pada Rapat  
Virtual di Sektor Infrastruktur Kritis Nasional**

**RAPAT PERSIAPAN PEMBAHASAN  
STANDAR KOMPETENSI KERJA NASIONAL INDONESIA  
BIDANG SECURITY OPERATION CENTER**

DIREKTORAT PENGENDALIAN SDM | DEPUTI 4 | BSSN  
24 APRIL 2020



KEMENTERIAN PERTAHANAN RI  
SEKRETARIAT JENDERAL

SURAT EDARAN

Nomor : SE/ 57 /IV/2020

TENTANG

APLIKASI *TELECONFERENCE* ZOOM TIDAK DIPERKENANKAN/DIGUNAKAN  
DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN PERTAHANAN  
TERKAIT PENGAMANAN INFORMASI DATA

1. Dasar:
  - a. Peraturan Menteri Pertahanan Nomor 68 Tahun 2014 tentang Pengamanan Informasi di lingkungan Kementerian Pertahanan RI dan TNI (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1630);
  - b. Peraturan Menteri Pertahanan Nomor 14 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertahanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 314);
  - c. Pertimbangan Pimpinan Kementerian Pertahanan terkait dengan Keamanan dan Pengamanan Informasi;
2. Sehubungan dengan dasar tersebut di atas, disampaikan kepada Kasatker/Kasubsatker di lingkungan Kemhan agar pelaksanaan *video conference* pada masing-masing jajaran tidak menggunakan aplikasi zoom dengan pertimbangan sebagai berikut:
  - a. Tidak adanya jaminan keamanan data dari pihak penyedia aplikasi zoom disebabkan aplikasi bersifat terbuka.
  - b. Adanya duplikasi *traffic* yang dilaporkan pihak penyedia aplikasi zoom ke server yang berada di negara lain, mengakibatkan data pembicaraan dapat dimonitor oleh pihak yang tidak berkepentingan.
  - c. Hasil analisa dan riset dalam beberapa kasus penggunaan aplikasi zoom telah dilaporkan kebocoran data dan telah diakui oleh pihak vendor zoom bahwa hal tersebut belum dapat diantisipasi secara tepat.
  - d. Setiap Satker jajaran Kemhan jika ingin menggunakan sarana *video conference* agar berkoordinasi dengan Pusdatin Kemhan cq Kabid Infratik Kolonel Arh Ananta Wira I.P, S.Sos nomor Hp 081993191992
3. Untuk kelancaran pelaksanaan Surat Edaran ini, agar Kapusdatin Kemhan menyiapkan dukungan *video conference* yang aman dan dapat diandalkan sebagai alternatif dalam komunikasi bagi pimpinan Kemhan.

b. Peraturan Menteri Pertahanan Nomor 14 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertahanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 314);

c. Pertimbangan Pimpinan Kementerian Pertahanan terkait dengan Keamanan dan Pengamanan Informasi;

2. Sehubungan dengan dasar tersebut di atas, disampaikan kepada Kasatker/Kasubsatker di lingkungan Kemhan agar pelaksanaan *video conference* pada masing-masing jajaran tidak menggunakan aplikasi zoom dengan pertimbangan sebagai berikut:

a. Tidak adanya jaminan keamanan data dari pihak penyedia aplikasi zoom disebabkan aplikasi bersifat terbuka.

b. Adanya duplikasi *traffic* yang dilaporkan pihak penyedia aplikasi zoom ke server yang berada di negara lain, mengakibatkan data pembicaraan dapat dimonitor oleh pihak yang tidak berkepentingan.

c. Hasil analisa dan riset dalam beberapa kasus penggunaan aplikasi zoom telah dilaporkan kebocoran data dan telah diakui oleh pihak vendor zoom bahwa hal tersebut belum dapat diantisipasi secara tepat.

d. Setiap Satker jajaran Kemhan jika ingin menggunakan sarana *video conference* agar berkoordinasi dengan Pusdatin Kemhan cq Kabid Infratik Kolonel Arh Ananta Wira I.P, S.Sos nomor Hp 081993191992

3. Untuk kelancaran pelaksanaan Surat Edaran ini, agar Kapusdatin Kemhan menyiapkan dukungan *video conference* yang aman dan dapat diandalkan sebagai alternatif dalam komunikasi bagi pimpinan Kemhan.

4. Surat Edaran ini sebagai pedoman untuk dilaksanakan.

Dikeluarkan di Jakarta  
pada tanggal 27 April 2020



Kepada Yth:

- Kasatker dan Kasubsatker  
di lingkungan Kemhan.

Tembusan:

1. Menhan
2. Wamenhan.

## Lembaga pemerintah rame-rame tinggalkan Zoom

11:25:43 | 27 Apr 2020



Suasana Rapat Terbatas secara online.(Foto:Setkab.go.id)

Perlu segera satu ketentuan yang jelas untuk penggunaan sistem vicon oleh lembaga pemerintah

# Kacau, 530.000 Data Akun Zoom Dijual Hacker di Dark Web

TECH - Redaksi, CNBC Indonesia | 16 April 2020 08:33

SHARE |  



IDN TIMES

**Trending** Lebih dari 47 Ribu Orang Sudah Menjalani Tes COVID-19

## Hacker Jual 530 Ribu Data Akun Zoom di Dark Web, Apakah Kamu Kena?

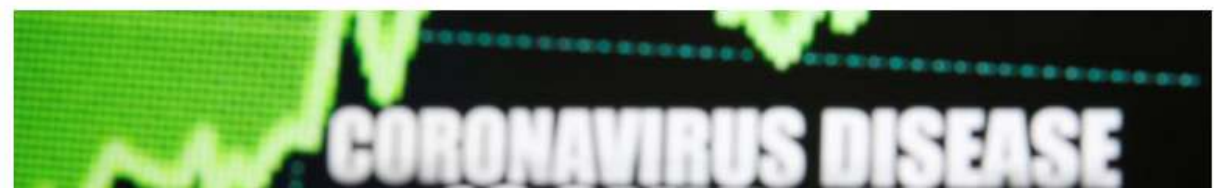
*Ini bukanlah kali pertama Zoom diterpa masalah keamanan*

Home ▸ New Economy ▸ Digital Economy

Senin, 20 April 2020 17:44 WIB

## Kacau! Software yang Dipakai Buat Curi Data Pengguna Zoom Dijual Online Seharga Rp7,8 M


Bagikan:  Share 1  Tweet  Share





**Permen Kominfo No.20/2016 dan RUU PDP sangat berkaitan dengan RPI Perpres No.96/2014**

# WORLD'S TOP APPS 2020











FOR MARCH 2020 BY DOWNLOADS (NON-GAME)

 seasia.co

## Overall Downloads

- 1  TikTok
- 2  WhatsApp
- 3  ZOOM
- 4  Facebook
- 5  Messenger
- 6  Instagram
- 7  SHAREit
- 8  Netflix
- 9  Snapchat
- 10  Google Classroom

## App Store Downloads

- 1  ZOOM
- 2  TikTok
- 3  DingTalk
- 4  Facebook
- 5  YouTube
- 6  Netflix
- 7  Instagram
- 8  VooV Meeting
- 9  Microsoft Teams
- 10  Houseparty

## Google Play Downloads

- 1  TikTok
- 2  WhatsApp
- 3  Facebook
- 4  ZOOM
- 5  Messenger
- 6  Instagram
- 7  SHAREit
- 8  Snapchat
- 9  Likee
- 10  Netflix

Peraturan Pemerintah nomor 71 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik (PSTE) sudah mulai berlaku sejak Oktober 2019. Ini merupakan pembaruan dari PP nomor 82 tahun 2012.

Perkembangan Teknologi

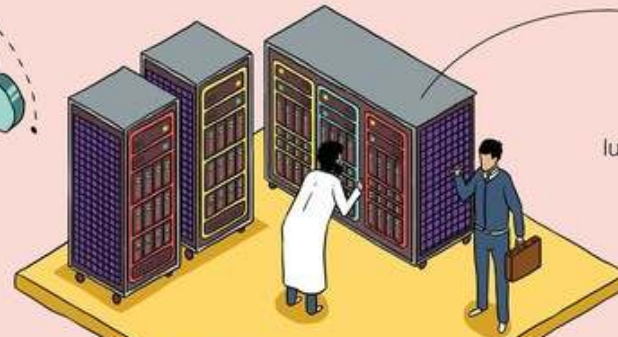
## Alasan Menteri Rudiantara Bolehkan Data Center di Luar Negeri

TECH - Chandra Gian Asmara, CNBC Indonesia | 30 October 2018 12:10

SHARE | 



# INI BAHAYANYA BILA DATA CENTER BERADA DI LUAR NEGERI



### Kedaulatan Data

Penempatan data center di luar negeri bisa membuat data Indonesia digunakan pihak lain sehingga perlindungan data menjadi lemah

### Masalah Ekonomi dan Biaya

Data center di luar negeri akan membuat cadangan devisa RI terkuras dan Dari segi biaya, data center dalam negeri akan lebih murah ketimbang di luar negeri



Tidak (ada manfaat positif). Jadi kita masih menganggap harus melindungi data-data pribadi masyarakat luas

**Teddy Sukardi**, Sekretaris Jenderal IDPRO

### Masalah Teknis

Ada beberapa aplikasi datanya harus dekat, harus cepat sampai, dan cepat diakses



WWW.CNBCINDONESIA.COM

SUMBER: CNBC INDONESIA / ILLUSTRASI & GRAFIS: ARIE PRATAMA

# PERAN PEMANGKU KEPENTINGAN TRANSFORMASI DIGITAL INDONESIA





# KOLABORASI STRATEGIS WANTIKNAS-WANTIKDA

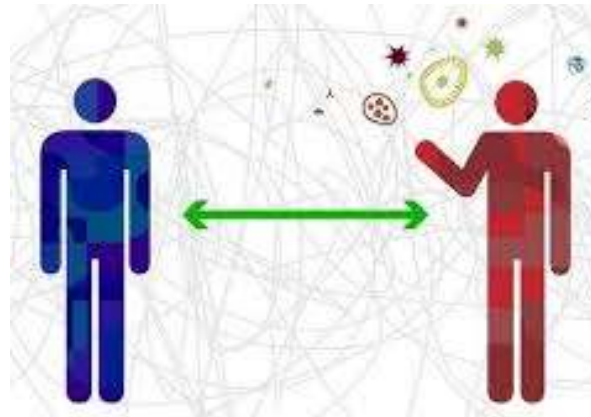
- Pandemi covid-19 “memberi pelajaran” bahwa
  - persaingan adalah pada pemberian Q jaringan dan Yan terbaik pada masyarakat
  - kerja sama dan kolaborasi (utamanya) ABGC amat diperlukan
  - transformasi digital telah berperan hadir lebih cepat sebagai kebutuhan
- *Peran WANTIKNAS & WANTIKDA sungguh amat strategis untuk pelaksanaan program TD bagi keberhasilan tujuan berbangsa dan bernegara*
- “Wantiknas Baru” secepatnya memulai program (pasca pandemi) dengan flagship baru berkolaborasi dengan semua pihak, khususnya “Wantikda Baru”



**Ide / Rancangan NGCIO  
Perlu Diwujudkan 2020**

**PSBB**

**WE CAN STOP CORONA**



**Work From Home**

**Belajar & Bekerja  
DI RUMAH  
AJA**



*Salam hangat  
dari Bandung,*





**Demi Raga  
Yang Lain**

*Thank You*

